



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 2959-2970

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Dynamic Governance Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

Prepti Rian Anggraini<sup>1✉</sup>, Marja Sinurat<sup>2</sup>, Layla Kurniawati<sup>3</sup>

Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email : [iyanmust@gmail.com](mailto:iyanmust@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity) menantang pemerintah untuk perubahan lingkungan strategis secara cepat, dinamis, kompleks, tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. Hal ini membuat reorientasi program reformasi birokrasi perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia, agar dapat beradaptasi dengan tata kelola pemerintahan yang dinamis (Dynamic Governance). Kemajuan teknologi yang maju pesat saat ini menuntut pemerintah untuk menawarkan layanan publik yang lebih terampil dan mampu bereaksi cepat terhadap perubahan kondisi lingkungan. Salah satu layanan yang mendasar adalah administrasi kependudukan. Penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Neo dan Chen (2007), dimana komponen dari Dynamic Governance adalah budaya, kemampuan, orang yang berkemampuan, dan proses yang tangkas. Selain itu juga terdapat faktor pendukung dan penghambat dynamic governance dalam pelayanan administrasi kependudukan serta upaya dalam mengatasi faktor penghambat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi, teknik purposive atau criterion based selection dan snowball sampling untuk pemilihan informan, analisis data penelitian ini terdiri dari reduksi data, display data, pengkodean, pengelompokan data (kategorisasi ciri/klasifikasi sifat), hingga pada penarikan kesimpulan, yang ditunjang dengan triangulasi data untuk keabsahan data. Hasil penelitian bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bone masih menuju Dynamic Governance.

Kata Kunci : *Dynamic Governance, Budaya, Kemampuan Dinamis, Orang Yang Berkemampuan, Proses yang Tangkas.*

## Abstract

The VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity) era has challenges the government to make rapid, dynamic, complex, unpredictable. This leads to the reorientation of the bureaucratic reform program that needs to be carried out by the Indonesian government in order to adapt to dynamic governance. The current rapidly advancing technology requires the government to offer public services that are more skillful and able to react quickly to changing environmental conditions. One of the fundamental services is population administration. This research refers to the theory put forward by Neo and Chen, namely the components of Dynamic Governance are culture, capabilities, capable people, and agile processes. In addition, there are also several supporting and inhibiting factors for dynamic governance in population administration services and efforts to overcome inhibiting factors. This research is a descriptive qualitative research, data collection techniques using interviews, documentation and observation, purposive or criterion-based selection techniques and snow ball sampling for selecting informants, this research data analysis consists of data reduction, data display, coding, data grouping (categorization of characteristics/classification of traits), to conclusion drawing, which is supported by data triangulation for data validity. The research results that population administration services in Bone Regency are still heading towards Dynamic Governance.

Keywords : *Dynamic Governance, Culture, Capabilities, Able People, Agile Process.*

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan mobilitas manusia yang sangat tinggi membuat konsekuensi disrupsi pada kehidupan modern saat ini. Dunia sedang mengalami perubahan lingkungan strategis yang cepat, dinamis, kompleks, tidak terduga, dan tidak pasti di era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity). Dalam menghadapi era ini, pemerintah Indonesia menyadari perlunya melakukan reorientasi program reformasi birokrasi agar dapat beradaptasi melalui pembentukan pemerintahan yang dinamis dan tangkas (Erwan Purwanto 2019).

Upaya perubahan atau reformasi birokrasi perlu dilakukan secara menyeluruh, untuk dapat memastikan pelaksanaan pemerintahan di Indonesia akan menjadi lebih baik dalam segala bidang. Dengan harapan pelayanan pemerintah kepada masyarakat pun menjadi lebih baik lagi, tanpa ada lagi segala bentuk penyelewengan dalam pemerintahan.

Reformasi birokrasi di gagas melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Reformasi Birokrasi perlu dilakukan

sebagai prasyarat utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga akan mempengaruhi perputaran roda pembangunan nasional menjadi semakin baik pula.

Reformasi birokrasi dapat diartikan sebagai upaya secara strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Keberhasilan dalam pembangunan bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah atau beberapa pihak saja, namun merupakan konsensus bersama (Marja Sinurat 2017).

Pemerintah Kabupaten Bone telah berkomitmen dalam hal peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang dapat dilihat dari upaya peningkatan pelayanan publik dengan pembangunan Mall Pelayanan Publik yang saat ini pembangunannya sedang berlangsung. Sesuai dengan Laporan Forum Konsultasi Publik Tahun 2021 dalam rangka Pembangunan Mall Pelayanan Publik, bahwa Mall Pelayanan Publik yang merupakan perluasan fungsi pelayanan publik terpadu pemerintah daerah dan pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Daerah serta pelayanan dari sektor swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman dalam satu tempat. Selain itu untuk meningkatkan daya saing secara global dalam memberikan kemudahan dalam usaha di Indonesia dengan prinsip keterpaduan, berdayaguna, koordinasi, akuntabilitas, aksestabilitas dan kenyamanan.

Sebagai dasar pelaksanaan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara prima, pelayanan yang profesional, sesuai dengan standar teknologi informasi dituangkan aturan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian dirubah dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bone dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dengan dasar Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

## METODE PENELITIAN

Creswell (2014) menerangkan bahwa metodologi kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan antara lain: penelitian partisipatoris, analisis wacana, etnografi, grounded theory, studi kasus, fenomenologi, dan naratif.

Menurut Kirk & Miller dalam Salam (2011), penelitian kualitatif adalah tradisi khusus dalam ilmu-ilmu sosial, yang secara fundamental bergantung pada "mengamati orang dalam batas teritorial mereka dan interaksinya dengan bahasa dan istilah mereka sendiri".

Metode deskriptif menurut penjelasan Moh. Indriantoro dan Supono (2012) mendefinisikan penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu popularisasi.

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah dengan menggunakan desain penelitian deskriptif, penulis dapat menggambarkan dan menguraikan keadaan atau kenyataan yang sebenarnya tentang dynamic governance dalam pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Dukcapil Kabupaten Bone secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antara fenomena yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan ini, peneliti menguraikan sesuai rumusan masalah dan tujuan penelitian, yakni bagaimanakah Dynamic Governance dalam pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

Paradigma baru ditawarkan oleh Neo dan Chen yang disebut sebagai Dynamic Governance, dimana pemerintah selalu dapat membuat kebijakan yang adaptif. Dynamic governance pada dasarnya hanya menekankan pada dua komponen utama yaitu kapabilitas dinamis (dynamic capabilities) dan budaya organisasi (institutional cultures), dimana kedua komponen ini akan menggerakkan sumberdaya manusia dan proses mengarah pada perubahan berbagai kebijakan yang adaptif menuju pada dynamic governance (dalam Azhar 2015). Secara lebih jelasnya dua elemen dari dynamic governance yaitu budaya organisasi dan kemampuan dinamis menurut Neo dan Chen (2007).

Budaya suku bugis yang termanifestasi dalam falsafah Sipakatau, Sipakalebi, Sipakainge' mempunyai arti nilai untuk menciptakan karakter manusia yang kuat, sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap pembentukan kepribadian setiap individu khususnya orang suku bugis. Ketika individu suku bugis telah terinternalisasi nilai falsafah tersebut, maka akan mengarahkan pada pola perilaku dan sikap ideal dan menjadi pemimpin yang memiliki karakter yang kuat, tidak mudah terjerumus dalam tindak pidana korupsi, berjiwa integritas, melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rahim 2019).

A. Budaya organisasi pemerintah meliputi Prinsip dan Kepercayaan;

1. Prinsip Terdiri dari :

a. integrity (integritas),

Dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bone, integritas ditunjukkan dengan melaksanakan sepenuh hati atas apa yang tertuang dalam pakta

integritas yang sudah di tandatangani oleh seluruh pegawai Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bone.

b. incorruptibility (semangat tidak korupsi),

Beberapa upaya dalam mencegah korupsi di Kabupaten Bone diantaranya adalah adanya Pecanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), pada hari senin, tanggal 27 September 2021.

c. meritocracy (berdasar bakat & kemampuan/prestasi),

Masih belum terlaksananya dengan baik merit sistem di Kabupaten Bone, terutama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.

d. market (orientasi pasar),

Pelayanan administrasi kependudukan di sebut market oriented atau berorientasi pasar dapat merujuk pada pendekatan pelayanan yang berorientasi pada pelanggan. Berdasarkan data hasil survey kepuasan pelanggan dan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan telah memenuhi kepuasan pelanggan, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bone dapat dinilai berorientasi pasar

e. pragmatism (mudah menyesuaikan/lebih berorientasi pada pencapaian tujuan),

layanan administrasi kependudukan dapat dinilai terpenuhi prinsip pragmatisnya, hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara, dan adanya pelayanan yang lebih praktis dan lebih cepat yaitu persyaratan yang semakin ringkas dan pelayanan online yang lebih memudahkan masyarakat.

f. multi-racialism (berbagai etnik),

pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bone dapat dinilai multi-etnik.

2. Kepercayaan (Beliefes) terdiri dari:

a. state activism (aktivitas negara),

Adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) secara terpusat adalah merupakan upaya pemerintah dalam mendorong sistem digitalisasi agar pelayanan administrasi kependudukan dapat terkoneksi secara nasional, sehingga masyarakat mendapat standar pelayanan yang sama di setiap daerah. Dynamic governance pada pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bone telah memenuhi aspek State Activism.

b. longterm (tujuan jangka panjang),

Sesuai pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Bone bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bone akan terus kami permudah dan

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Langkah-langkah kongkrit ini telah dituangkan melalui penyusunan rencana berupa dokumen perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, tentu perencanaan tersebut dengan mempertimbangkan perkembangan demografi, teknologi, anggaran dan kebutuhan masyarakat dimasa mendatang

c. relevance (kebijakan yang sesuai kehendak masyarakat),

Layanan administrasi kependudukan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Hal ini terbukti dari beberapa inovasi layanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone diantaranya yaitu "Cek Aku" (Cetak Ditempat Administrasi Kependudukan), Pake Jempol Cepat (Pelayanan Keliling Jemput Bola Cetak Ditempat), Layanan Prioritas "Ladang Talas" (Layanan Penyandang Disabilitas, Lansia dan Sakit), "Sabtu Produktif" (Layanan Pada Hari Libur), Layanan Terpadu One Day Service (Layanan Terpadu dengan Instansi Lain), "Mabbaine" (Layanan Administrasi Kependudukan Untuk Pengantin Baru). Adanya inovasi-inovasi layanan ini adalah untuk memberikan layanan maksimal kepada masyarakat Kabupaten Bone dengan menyesuaikan kebutuhan, situasi dan kondisi yang ada di Kabupaten Bone.

d. growth (pertumbuhan),

Growth atau pertumbuhan dalam dynamic governance dapat diartikan berkaitan dengan pengembangan kapasitas organisasi yang bertanggungjawab atas pelayanan administrasi kependudukan. Peningkatan kapasitas organisasi akan membuat pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih berkembang, efektif, efisien dan responsif pada kebutuhan masyarakat. Saat ini inovasi layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bone bertambah dengan membuka layanan melalui aplikasi Whatsapp, yang sebelumnya hanya melalui loket pelayanan manual.

e. stability (stabilitas),

Pelayanan administrasi kependudukan telah memenuhi aspek stabil. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kejelasan aturan perundang-undangan, adanya standar pelayanan, serta dampak dari kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang menjadikan kondisi masyarakat menjadi stabil.

f. bijaksana (prudence),

Terdapat layanan inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone yaitu Layanan Prioritas "Ladang Talas" atau yang dimaksud adalah Layanan Penyandang Disabilitas, Lansia dan Sakit. Inovasi layanan ini adalah bentuk layanan administrasi kependudukan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Bone yang

disabilitas, masyarakat lanjut usia, ODGJ (orang dengan gangguan jiwa), dan kondisi sakit, yang tidak memungkinkan bisa datang langsung ke loket pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sehingga Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone membentuk Tim Layanan yang langsung turun kelapangan, mendatangi ke rumah-rumah masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi kependudukan. Layanan ini biasanya diadakan pada hari minggu. Inovasi layanan lain nya "Cek Aku", "Sabtu Produktif", "Mabbaine", Layanan Terpadu adalah beberapa inovasi layanan yang merupakan bentuk dari kebijaksanaan yang diambil dalam layanan administrasi kependudukan agar pelayanan bisa lebih maksimal.

g. mandiri (self-reliance),

Kemandirian dalam pengelolaan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum dapat sepenuhnya memenuhi anggaran, masih bergantung pada anggaran pemerintah pusat maupun daerah, selain itu prinsip kemandirian dalam hal menentukan kebijakan pada pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bone belum terpenuhi, karena kebijakan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan adalah ketentuan dari pemerintah pusat.

B. Kapabilitas dinamis meliputi:

Kapabilitas dalam dynamic governance sebagai sikap, pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya organisasi yang digunakan untuk memahami dan melaksanakan tugas yang dikoordinasikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang paling utama dalam kapabilitas dynamic governance adalah kemampuan pemimpin, yaitu pemimpin yang memiliki kemampuan dan pengaruh yang besar untuk menggerakkan bawahan maupun stakeholder lainnya untuk melakukan perubahan. Terdapat 3 (tiga) kemampuan dalam dynamic governance yaitu Thinking Ahead (berpikir kedepan), Thinking Again (berpikir ulang), Thinking Across (berpikir lintas batas). Kemampuan mengeksplorasi dan mengantisipasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dapat dinilai sudah baik. Hal tersebut dilihat dari hasil wawancara, data dan pengamatan, bahwa kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi dalam inovasi pelayanan untuk mengantisipasi perkembangan di masyarakat, dan kerjasama dengan desa untuk mendorong pelayanan administrasi kependudukan dapat dilakukan pada tingkat desa untuk mengeksplorasi sumberdaya yang ada di desa untuk mendekatkan dan memudahkan pelayanan.

a. thinking ahead (berpikir ke depan),

Dari hasil wawancara, dan pengamatan peneliti, dengan demikian dapat di simpulkan bahwa kemampuan thinking ahead, terkait dengan kemampuan memahami perkembangan pada pelayanan administrasi kependudukan telah sesuai, hal tersebut

terlihat dari kemampuan dalam penggunaan teknologi pada pelayanan administrasi kependudukan, dan menyertakan pertimbangan perkembangan situasi dan lingkungan pada analisis rencana strategi pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.

b. thinking again (mengkaji ulang),

Kemampuan thinking again mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dalam mengevaluasi dan mengidentifikasi perubahan kebijakan yang telah ditetapkan yang kurang efektif sehingga dapat memperoleh hasil dan kualitas yang lebih baik. Kemampuan berpikir ulang ini dapat dilihat lebih rinci dari kemampuan meninjau dan menganalisis ulang kinerja, kemampuan menyelidiki feed back, kemampuan meninjau kembali strategi, mendesain ulang kebijakan atau program, menerapkan kebijakan/sistem baru.

c. thinking across (belajar dari pihak luar/organisasi lain).

Kemampuan berpikir lintas batas yang dimaksud adalah kemampuan dalam menyeberangi batasan untuk mempelajari pengalaman pihak lain. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone mengarahkan untuk mengadakan kegiatan studi banding dan juga mempelajari pengalaman dari kabupaten atau provinsi lain dalam kesempatan program "Dukcapil Belajar" yang dilaksanakan oleh Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri secara online setiap hari sabtu nya, baik melalui zoom meeting maupun live streaming youtube dan mengambil ide lain yang memungkinkan bisa di adaptasi untuk dilaksanakan di Kabupaten Bone. Kemampuan dalam berpikir lintas batas dapat berupa mencari ide baru, merenungkan ide, menyesuaikan dengan kondisi lokal kemudian mengkombinasi dan menginovasi sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Bone.

Pada dimensi kemampuan dinamis atau capabilities maka secara keseluruhan sub indikator dapat dirincikan hasil penelitian sebagaimana pada tabel 1.

Tabel 1.  
Kemampuan Dynamic Governance  
Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.

Kemampuan Dinamis	Sub Indikator	Uraian	Kode
1	2	3	4
<i>Thinking Ahead</i>	Mengeksplorasi dan mengantisipasi	Mengeksplorasi dengan mendorong pelayanan adminduk di tingkat pemerintah desa, dengan mengadakan kerjasama dengan desa, untuk menyediakan sarana pelayanan berupa perangkat komputer dan printer, yang juga dalam rangka mendukung program desa digital.	R
	Memahami Perkembangan	Mendorong pelayanan menggunakan Teknologi Informasi, karena perkembangan kedepan serba digital, dan membuat rencana kerja dengan menganggarkan lebih banyak pada tahun 2023 dan 2024 karena memahami bahwa kedepan akan ada pemilu 2024.	R
	Menyusun Strategi	Penyusunan Strategi Dinas Dukcapil Kab Bone dalam bentuk Rencana Strategi yang diselaraskan dari RPJMD dan menjadi Rencana Kerja dalam 1 tahun anggaran.	R
	Mempengaruhi Kebijakan	Dalam hal kebijakan peraturan perundangan dalam pelayanan administrasi kependudukan belum ada kemampuan yang relevan, namun kebijakan mengenai anggaran karena usulan dari Dinas Dukcapil Kepada Kepala Daerah (Bupati) berhasil dipenuhi.	TR

<i>Thinking Again</i>	Meninjau dan Menganalisa Kinerja	Kinerja Dinas Dukcapil Kabupaten Bone dilaporkan pada LKJIP, kemudian di analisis faktor penghambat dan prndukungnya serta upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kinerja.	R
	Menyelidiki <i>Feedback</i>	Feedback atas layanan administrasi kependudukan yang diberikan dari masyarakat diberikan prioritas khusus untuk menjadi perhatian dan segera di tindaklanjuti oleh Dinas Dukcapil.	R
	Meninjau Kembali Strategi	Strategi yang ada di evaluasi, jika dinilai kurang tepat akan di tinjau kembali dan di sesuaikan dengan perubahan situasi yang ada, seperti hal nya situasi pandemi Covid-19.	R
	Mendesain Ulang Kebijakan/Program	Program layanan administrasi kependudukan di rancang ulang untuk menyesuaikan perkembangan situasi, seperti halnya situasi Pandemi Covid-19.	R
	Menetapkan Kebijakan/Ketentuan Baru	Dalam hal menentukan kebijakan dan ketentuan baru menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan dinas dukcapil bersifat melaksanakan teknis pelayanan.	TR
Thinking Across	Mencari Ide Baru	Ide baru di inisiasi dari unsur pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Dukcapil Kab Bone dan Kepala Bidang.	R
	Merenungkan yang dilakukan pihak lain	Proses pemikiran ide dari pihak lain dilakukan hanya pada unsur pimpinan.	TR
	Mengevaluasi Dalam Konteks Lokal	Ide baru di evaluasi disesuaikan dengan situasi dan kondisi Kab Bone sehingga menjadikan beberapa inovasi layanan.	R

	Mencocokkan Ide baru dengan Kebutuhan/tuntutan Masyarakat Lokal	Inovasi layanan yang ada merupakan hasil dari penyesuaian ide baru dengan kebutuhan masyarakat Kab Bone.	R
--	---	--	---

Ket : R-Relevan / TR-Tidak Relevan

Sumber: diolah dari analisis pembahasan hasil penelitian.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Dynamic Governance pada pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bone, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bone belum sepenuhnya dynamic governance. Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bone dapat di kategorikan menuju Dynamic Governance.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adejaya, Muhammad S dan Agus, Heruanto Hadna. 2018. Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Ahmad Mansyur, 2011, Teori-Teori Mutakhir Administrasi Publik, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006: 134 . Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta.
- Atmaji, Dwi Wahyu. 2020. Kementerian PANRB Dorong Lima Quick Wins Reformasi Birokrasi 2020-2024. Menpan.go.id/site/berita-terkini/kemetrian-panrb.
- Creswell, W. Jhon, 2014, Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fakrulloh, Zudan Arif. 2021. 12 Kebijakan Dukcapil Mudahkan Masyarakat Peroleh Layanan Adminduk. Tersedia: <http://capil.kemendagri.go.id>.
- Helfat, C.E. dkk, 2007, Dynamic Capabilities : Understanding Strategic Change in Organizations, Malden : Blackwell Publishing Ltd.
- Kasim, Azhar,dkk.,2015, Merekonstruksi Indonesia:Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance, Yayasan Indonesia Lebih Baik (YILB), Kompas, Jakarta.

- Neo, Boon Siong dan Chen, Geraldine, 2007, *Dynamic Governance : Embedding Culture, Capabilities and Changes in Singapore*, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. Singapore.
- Pajri, Endar Heryan. 2014: 2. Analisis Pelayanan Publik Dalam Perspektif Dynamic Governance (Studi tentang kapabilitas dinamis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya dalam penyelenggaraan pelayanan pasport. Tersedia: <https://repository.unair.ac.id/72519/>
- Purwanto, Erwan Agus, dkk., 2017, *Pelayanan Publik, Modul Pelatihan Dasar Calon PNS*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- , Erwan Agus. 2019, *Kebijakan Publik yang Agile Dan Inovatif Dalam Memenangkan Pesaingan Di Era VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Abiguous)*, UGM, Yogyakarta.
- Simangunsong, Fernandes, 2017, *Metodologi Penelitian Pemerintahan Teoritik, Legalistik, Empirik, Inovatif*, Alfabeta, Bandung.
- Sinurat, Marja & Panjaitan, Horas, 2017, *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*, Pustaka Rahmat, Bandung.
- Syafri, Wirman dan Alwi, 2014, *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Publik*, Jatinangor: IPDN Press.
- The Liang Gie, 1992, *Administrasi perkantoran modern*, Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi, Liberty, Yogyakarta.
- Wasistiono dan Simangunsong, 2015, *Metodologi Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi yang Diperluas)*, IPDN Press, Jatinangor.
- , dan Anggraini, 2019, *Three Paragidms In Government (Good Governance, Dynamic Governance, And Agile Governence)*, Vol 4, 13 halaman.